



**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN**  
**BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH I**  
Jalan Banda Aceh – Meulaboh Km. 7,5, Kec. Peukan Bada, Aceh Besar  
Telp. (0651) 45306/23226  
Pos-el bpkwilayah1@gmail.com  
Laman <https://kebudayaan.go.id>

---

Nomor : 147/BPKWIL1/KU/2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Surat Pengantar Laporan Keuangan

Aceh Besar, 14 Juli 2025

Yang Terhormat,  
**Kepala KPPN Banda Aceh**  
Di tempat

Sehubungan dengan program Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2025, terkait pelaporan keuangan, berikut terlampir kami kirimkan Laporan CaLK Semester I UAKPA Tahun Anggaran 2025.

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala,  
  
Piet Rusdi, S.Sos  
NIP 198003042006051003

Laporan Keuangan Semester I 2025

**Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2025

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kebudayaan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Aceh Besar, 13 Juli 2025

**Kepala**



**Piet Rusdi**  
**198003042006051003**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	5
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	
B.1 Pendapatan	
B.1.2 Penerimaan Pajak	
B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
C.7 Piutang Bukan Pajak	
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.13 Persediaan	
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	
C.19 Tanah	
C.20 Tanah Belum Diregister	
C.21 Peralatan dan Mesin	
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
C.23 Gedung dan Bangunan	
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
C.27 Aset Tetap Lainnya	
C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister	
C.29 Konstruksi Dalam Pengerjaan	

- C.30 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
  - C.31 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
  - C.32 Aset Tak Berwujud
  - C.33 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
  - C.34 Aset Lain-lain
  - C.35 Aset Lainnya yang Belum Diregister
  - C.36 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
  - C.37 Utang kepada Pihak Ketiga
  - C.38 Utang Yang Belum Ditagihkan
  - C.39 Hibah Yang Belum Disahkan
  - C.40 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
  - C.41 Pendapatan Diterima Dimuka
  - C.42 Uang Muka dari KPPN
  - C.43 Utang Jangka Pendek Lainnya
  - C.44 Ekuitas
  - C.45 Catatan Penting Lainnya neraca
  - D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional
    - D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak
    - D.2 Beban Pegawai
    - D.3 Beban Persediaan
    - D.4 Beban Barang dan Jasa
    - D.5 Beban Pemeliharaan
    - D.6 Beban Perjalanan Dinas
    - D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat
    - D.8 Beban Bantuan Sosial
    - D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi
    - D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
    - D.11 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar
    - D.12 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
    - D.13 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
    - D.14 Pos Luar Biasa
    - D.15 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional
  - E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
    - E.1 Ekuitas Awal
    - E.2 Surplus (Defisit) LO
    - E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
    - E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
    - E.5 Transaksi Antar Entitas
    - E.6 Ekuitas Akhir
  - F. Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas
- VI. Lampiran dan Daftar

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 30 Juni 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Aceh Besar, 13 Juli 2025

**Kepala**



**Piet Rusdi**

**NIP. 198003042006051003**

## RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp1.725.000 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.725.000 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp7.681.375.961 atau mencapai 20,36 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp37.736.045.000.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 30 Juni 2025. Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp560.000.000 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp560.000.000; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.051.815.733 dan Rp-491.815.733

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp8.173.191.694 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-8.173.191.694, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1.725.000 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-8.171.466.694.

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp0, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-8.171.466.694 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 7.679.650.961 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp-491.815.733

## **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

## DAFTAR TABEL

---

- 1 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
- 2 Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I TA 2025 dan 2024
- 3 Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Semester I TA 2025 dan 2024
- 4 Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2025 dan 2024
- 5 Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Semester I TA 2025 dan 2024
- 6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2025
- 7 Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA 2025 dan 2024
- 8 Perbandingan Belanja Barang Semester I TA 2025 dan 2024
- 9 Perbandingan Belanja Modal Semester I TA 2025 dan 2024
- 10 Perbandingan Belanja Modal Tanah Semester I TA 2025 dan 2024
- 11 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I TA 2025 dan 2024
- 12 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester I TA 2025 dan 2024
- 13 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Semester I TA 2025 dan 2024
- 14 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester I TA 2025 dan 2024

## **DAFTAR GRAFIK**

---

---

1 Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2025

## DAFTAR LAMPIRAN

---

LAMPIRAN	I	Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan
LAMPIRAN	II	Laporan Operasional Periode 30 Juni 2025 dari Aplikasi Sakti
LAMPIRAN	III	Laporan Perubahan Ekuitas Periode 30 Juni 2025 dari Aplikasi Sakti
LAMPIRAN	IV	Laporan Realisasi Anggaran Periode 30 Juni 2025 dari Aplikasi Sakti
LAMPIRAN	V	Laporan Neraca Periode 30 Juni 2025 dari Aplikasi Sakti
LAMPIRAN	VI	Neraca Percobaan AkruaI Periode 30 Juni 2025 dari Aplikasi Sakti
LAMPIRAN	VII	Neraca Percobaan Kas Periode 30 Juni 2025 dari Aplikasi Sakti
LAMPIRAN	VIII	Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal dari Aplikasi Sakti
LAMPIRAN	IX	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun dari Aplikasi Sakti
LAMPIRAN	X	Laporan Realisasi Kinerja

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024**

U R A I A N	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2024 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
<b>PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>B.1</b>				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	-	1.725.000	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>-</b>	<b>1.725.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2</b>				
Belanja Pegawai	B.2.1	8.864.970.000	3.948.896.195	44,54	-
Belanja Barang	B.2.2	23.086.499.000	3.732.479.766	16,17	-
Belanja Modal	B.2.3	5.784.576.000	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>37.736.045.000</b>	<b>7.681.375.961</b>	<b>20,36</b>	<b>-</b>

Aceh Besar, 13 Juli 2025  
Kepala



**Piet Rusdi**  
198003042006051003

**NERACA**  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024

URAIAN	Catatan	2025	2024
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	560.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Persediaan	C.15	-	-
Persediaan yang Belum Diregister	C.16	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>560.000.000</b>	<b>-</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.23	-	-
Tanah Belum Diregister	C.24	-	-
Peralatan dan Mesin	C.25	-	-
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.26	-	-
Gedung dan Bangunan	C.27	-	-
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.28	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.29	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.30	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.31	-	-
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.32	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.33	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.34	-	-
Aset Konsesi Jasa	C.35	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	C.36	-	-
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.37	-	-
Aset Tak Berwujud	C.38	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.39	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.40	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.41	-	-
Aset Lain-lain	C.42	-	-
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.43	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.44	-	-
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>560.000.000</b>	<b>-</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.45	491.815.733	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.46	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.47	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.48	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.49	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.50	560.000.000	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.51	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>1.051.815.733</b>	<b>-</b>
Kewajiban Konsesi Jasa	C.52	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>1.051.815.733</b>	<b>-</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.53	(491.815.733)	-
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>(491.815.733)</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>560.000.000</b>	<b>-</b>

Aceh Besar, 13 Juli 2025  
Kepala



**Piet Rusdi**  
198003042006051003

## LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>		-	-
<b>BEBAN</b>			
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban Pegawai	D.3	4.194.691.928	-
Beban Persediaan	D.4	-	-
Beban Barang dan Jasa	D.5	2.807.340.947	-
Beban Pemeliharaan	D.6	668.965.861	-
Beban Perjalanan Dinas	D.7	502.192.958	-
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
<b>Jumlah Beban</b>		<b>8.173.191.694</b>	-
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(8.173.191.694)</b>	-
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	-	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	1.725.000	-
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>1.725.000</b>	-
<b>Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa</b>		<b>(8.171.466.694)</b>	-
<b>Pos Luar Biasa</b>			
Pendapatan PNBPN	D.15	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>(8.171.466.694)</b>	-

Aceh Besar, 13 Juli 2025  
Kepala



**Piet Rusdi**  
198003042006051003

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	E.2	<b>(8.171.466.694)</b>	-
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR</b>	E.3	-	-
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>	E.4	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	E.5	7.679.650.961	-
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>		(491.815.733)	-
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.6	<b>(491.815.733)</b>	-

Aceh Besar, 13 Juli 2025  
Kepala



**Piet Rusdi**  
198003042006051003

**A. PENJELASAN UMUM**

**A.1. Profil dan Kebijakan Teknis**

*Dasar hukum Entitas dan Rencana Strategis*

**A.1.1. Dasar Hukum**

Satker Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia yang berada di Provinsi Aceh dengan tugas melaksanakan pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Pembentukannya didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI No. 33 Tahun 2022. Namun pada tahun 2024, pemerintah membentuk Kementerian Kebudayaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024: Menetapkan Kementerian Kebudayaan dan tugas-tugasnya, sehingga Satker Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I berada dibawah kewenangan Kementerian Kebudayaan dengan Eselon I Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi.

**A.1.2. Lokasi**

Satker Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I berlokasi di Kabupaten Aceh Besar, tepatnya di Jalan Jl. Banda Aceh – Meulaboh Km. 7,5 Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

**A.1.3. Wilayah Kerja**

Satker Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia yang berada di Provinsi Aceh, dengan meliputi 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

**A.1.4. Sejarah Kantor**

Satker Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia yang berada di Provinsi Aceh dengan tugas melaksanakan pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Pembentukannya didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI No. 33 Tahun 2022. Balai ini berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi. Balai Pelestarian Kebudayaan merupakan penggabungan dari 2 (dua) UPT yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya dengan tugas dan fungsi melaksanakan Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya yang berada di wilayah kerjanya dan Balai Pelestarian Nilai Budaya dengan tugas dan fungsi melaksanakan pelestarian aspek-aspek tradisi kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejahteraan diwilayah kerjanya. Dan terhitung tanggal 1 November 2022 BPCB Aceh dan BPNB Aceh digabung menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I.

**A.1.5. Tugas dan Fungsi Utama**

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I sesuai dengan Permendikbudristek No. 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan adalah sebagai berikut

- a. Pelaksanaan Pelindungan Cagar Budaya, Objek yang Diduga Cagar Budaya, dan Objek Pemajuan Kebudayaan wilayah kerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I;
- b. Fasilitasi Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan di wilayah kerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I;
- c. Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Pelestarian Cagar Budaya, Objek yang Diduga Cagar Budaya, dan Objek Pemajuan Kebudayaan di wilayah kerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I;
- d. Pelaksanaan Pendataan dan Pendokumentasian Cagar Budaya, Objek yang Diduga Cagar Budaya, dan Objek Pemajuan Kebudayaan di wilayah kerja Balai Pelestarian Wilayah I;
- e. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Cagar Budaya, Objek yang Diduga Cagara Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan di wilayah kerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I;
- f. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I.

**A.1. Rencana Strategis**

Sesuai dengan RPJMN, arahan presiden yang berkenaan dengan pembangunan SDM dilaksanakan dalam dua agenda pembangunan: (1) meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan (2) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Berdasarkan Arah kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Direktorat Jenderal Kebudayaan akan dilakukan strategi di tingkat UPT Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I untuk meyelaraskan dan mensukseskan Kebijakan tersebut.

Kondisi yang ingin dicapai dalam kaitannya dengan upaya penguatan budaya adalah cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan yang terkelola dengan baik. Strategi yang dilakukan Kemendikbudristek dalam rangka pengelolaan kebudayaan adalah:

1. Memetakan keberadaan CB dan OPK untuk membuat peta jalan pengelolaan CB dan OPK secara holistik;
2. Memperkuat kerja sama dengan organisasi di daerah, dan juga pemerintah daerah untuk pengelolaan CB dan OPK secara mandiri sesuai dengan standar konservasi budaya UNESCO; dan
3. Memanfaatkan CB dan OPK untuk penguatan nilai-nilai budaya daerah dan juga nilai-nilai ekonomi, salah satunya sebagai tujuan wisata, tetapi tetap berfokus pada keberlanjutan pelestariannya.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I akan mengembangkan model pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan kolaborasi dan berkelanjutan. Model pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan kolaborasi dan berkelanjutan berupaya melibatkan seluruh pemangku kepentingan di wilayah kerja dalam setiap aspek pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan yang meliputi aspek pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, dan pembinaan. Penguatan pondasi pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan harus dilakukan secara berkelanjutan agar dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

## **Pendekatan**

### **A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan periode 30 Juni 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

## **Basis Akuntansi**

### **A.3 BASIS AKUNTANSI**

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **Dasar Pengukuran**

### **A.4. DASAR PENGUKURAN**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## **Kebijakan Akuntansi**

### **A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

## **Pendapatan-LRA**

### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## **Pendapatan-LO**

### **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## **Belanja**

### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

## **Beban**

### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## **Aset**

### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - \* harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - \* harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - \* harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

## Aset Tetap

### b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

## Penyusutan Aset Tetap

### c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.  
Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### ***Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap***

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

## Piutang Jangka Panjang

### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

## Aset Lainnya

### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## Kewajiban

### (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## Ekuitas

### (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	-	-
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	8.864.970.000	8.864.970.000
Belanja Barang	23.289.699.000	23.086.499.000
Belanja Modal	5.765.376.000	5.784.576.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>37.920.045.000</b>	<b>37.736.045.000</b>

Realisasi Pendapatan  
Rp1.725.000

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp1.725.000 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.725.000. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya Satker Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I adalah satker Kementerian Kebudayaan yang merupakan hasil pindahan/Likuidasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sehingga belum dapat dilihat kenaikan dan penurunan karena pada tahun sebelumnya masih di Kementerian Lama.

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	1.725.000	-
<b>Jumlah</b>	-	<b>1.725.000</b>	-

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

*Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I TA 2025 dan 2024*

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.725.000	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.725.000</b>	-	-

Realisasi Penerimaan  
Pajak Rp0

### B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA TA 2025 sebesar 0,00 dari TA 2024 . Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

*Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Semester I TA 2025 dan 2024*

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

*Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Semester I TA 2025 dan 2024*

<b>URAIAN</b>	<b>REALISASI T.A. 2025</b>	<b>REALISASI T.A. 2024</b>	<b>%</b>
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-
<b>Pengembalian Pendapatan</b>	-	-	-
<b>Pendapatan Pajak/Bea Cukai</b>	-	-	-



## B.2 Belanja

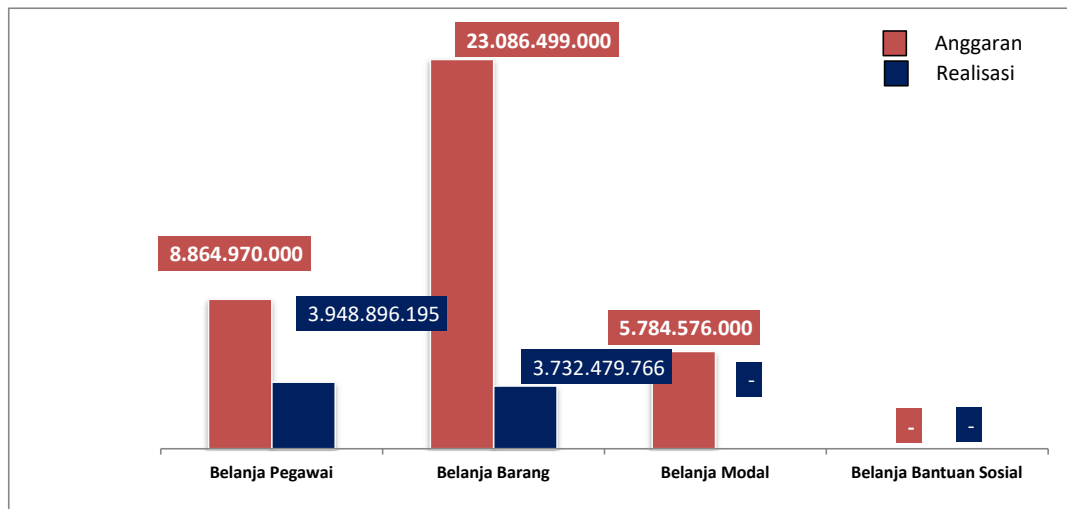
Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp7.681.375.961 atau 20,36 % dari anggaran belanja sebesar Rp.37.736.045.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2025

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	8.864.970.000	3.948.896.195	44,54
Belanja Barang	23.086.499.000	3.732.479.766	16,17
Belanja Modal	5.784.576.000	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>37.736.045.000</b>	<b>7.681.375.961</b>	<b>20,36</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2025



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00% Satker Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I adalah satker Kementerian Kebudayaan yang merupakan hasil pindahan/Likuidasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sehingga belum dapat dilihat kenaikan dan penurunan karena pada tahun sebelumnya masih di Kementerian Lama.. Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	3.948.896.195	-	-
Belanja Barang	3.732.479.766	-	-
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>7.681.375.961</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.948.896.195 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00 % dari TA 2024. Hal ini disebabkan Satker Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I adalah satker Kementerian Kebudayaan yang merupakan hasil pindahan/Likuidasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sehingga belum dapat dilihat kenaikan dan penurunan karena pada tahun sebelumnya masih

Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.450.937.600	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.018	-	-
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	103.793.600	-	-
Belanja Tunj. Anak PNS	29.661.848	-	-
Belanja Tunj. Struktural PNS	14.400.000	-	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	48.380.000	-	-
Belanja Tunj. PPh PNS	17.272.593	-	-
Belanja Tunj. Beras PNS	71.333.700	-	-
Belanja Uang Makan PNS	131.610.000	-	-
Belanja Tunjangan Umum PNS	39.680.000	-	-
Belanja Gaji Pokok PPPK	121.202.865	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.067	-	-
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4.912.186	-	-
Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.964.874	-	-
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	13.206.666	-	-
Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.071.210	-	-
Belanja Uang Makan PPPK	14.948.000	-	-
Belanja Uang Lembur	14.901.000	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.695.285.115	-	-
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kiner	169.311.853	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja kotor</b>	<b>3.948.896.195</b>	-	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.948.896.195</b>	-	-

### B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.732.479.766 dan Rp0. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dari Realisasi TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Satker Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I adalah satker Kementerian Kebudayaan yang merupakan hasil pindahan/Likuidasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sehingga belum dapat dilihat kenaikan dan penurunan karena pada tahun sebelumnya masih di Kementerian Lama

Perbandingan Belanja Barang Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	1.639.319.829	-	-
Belanja Barang Non Operasional	615.322.400	-	-
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	-	-
Belanja Jasa	306.678.718	-	-
Belanja Pemeliharaan	668.965.861	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	502.192.958	-	-
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-

Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>3.732.479.766</b>	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.732.479.766</b>	-	-



### B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh Satker Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I adalah satker Kementerian Kebudayaan yang merupakan hasil pindahan/Likuidasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sehingga belum dapat dilihat kenaikan dan penurunan karena pada tahun sebelumnya masih di Kementerian Lama.

Perbandingan Belanja Modal Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	-	-

#### B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh Satker Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I adalah satker Kementerian Kebudayaan yang merupakan hasil pindahan/Likuidasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sehingga belum dapat dilihat kenaikan dan penurunan karena pada tahun sebelumnya masih

Perbandingan Belanja Modal Tanah Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	-	-

#### B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh Satker Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I adalah satker Kementerian Kebudayaan yang merupakan hasil pindahan/Likuidasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sehingga belum dapat dilihat kenaikan dan penurunan karena pada tahun sebelumnya masih di

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	-	-

### B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Satker Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I adalah satker Kementerian Kebudayaan yang merupakan hasil pindahan/Likuidasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sehingga belum dapat dilihat kenaikan dan penurunan karena pada tahun sebelumnya masih di Kementerian Lama.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester I TA 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	-	-

### B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan Satker Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I adalah satker Kementerian Kebudayaan yang merupakan hasil pindahan/Likuidasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sehingga belum dapat dilihat kenaikan dan penurunan karena pada tahun sebelumnya masih di Kementerian Lama.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Semester I TA 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	-	-

### B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan Satker Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I adalah satker Kementerian Kebudayaan yang merupakan hasil pindahan/Likuidasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sehingga belum dapat dilihat kenaikan dan penurunan karena pada tahun sebelumnya masih di Kementerian Lama.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester I TA 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	-	-

#### B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Belanja Bantuan Sosial Satker Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I adalah satker Kementerian Kebudayaan yang merupakan hasil pindahan/Likuidasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sehingga belum dapat dilihat kenaikan dan penurunan karena pada tahun sebelumnya masih di

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester I TA 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	-	-

#### B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.560.000.000 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran Merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Semester I TA 2025 dan 2024*

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran - GUP	60.000.000	-
Kas di Bendahara Pengeluaran - TUP	500.000.000	-
-	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>560.000.000</b>	<b>-</b>

*Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :*

Kas tersebut di simpan pada Rekening Virtual dengan Nomor Rekening 8101646933131000 Bank Syariah Indonesia

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan Meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Semester I TA 2025 dan 2024*

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :*

**C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas Merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

*Kas Lainnya dan Setara Kas Semester I TA 2025 dan 2024*

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

**C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)**

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

*Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Semester I TA 2025 dan 2024*

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

**C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)**

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

*Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Semester I TA 2025 dan 2024*

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Penjelasan tentang Uang Muka Belanja :

**C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Semester I TA 2025 dan 2024*

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
------------	------------	------------

	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima :*

-



*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Semester I TA 2025*

<b>Kualitas Piutang</b>	<b>Nilai Piutang Jangka Pendek</b>	<b>% penyisihan</b>	<b>Nilai Penyisihan</b>
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-

*Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0*

**C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Semester I TA 2025 dan 2024*

<b>Jenis</b>	<b>REALISASI T.A.2025</b>	<b>REALISASI T.A. 2024</b>
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0*

**C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Semester I TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan  
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

**C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Semester I TA 2025 dan 2024

Jenis	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

**C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Semester I TA 2025 dan 2024*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-

Persediaan Rp0

**C.15 Persediaan**

Nilai Persediaan tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan Semester I TA 2025 dan 2024*

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Barang Konsumsi	-	-
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Persediaan tersebut di atas dalam

**Penjelasan terkait dengan persediaan dalam rangka penanganan pandemi covid-19**

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 merupakan sisa persediaan yang dibeli sendiri atau berasal dari transfer dan hibah yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 30 Juni 2025. Berikut ini daftar persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

*Rincian Persediaan dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19*

No.	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	<b>Jumlah</b>	-	-

Persediaan yang Belum  
Diregister Rp0

### C.16 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan  
Tuntutan  
Perbendaharaan/Tuntutan  
Ganti Rugi Rp0

### C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Semester I TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Piutang Tagihan  
Penjualan Angsuran  
Rp0

### C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 30 Juni 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Semester I TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Piutang Jangka  
Panjang lainnya Rp0

### C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 30 Juni 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Semester I TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

### C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 30 Juni 2025 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Semester I TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Tagihan PA</b>			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-		-

### C.21 Properti Investasi

Nilai Properti Investasi per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Properti Investasi 30 Juni 2025 untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut:

Rincian Properti Investasi Semester I TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

### C.21 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kontra akun Aset Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Properti Investasi.

### Tanah Rp0

### C.23 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Tanah tersebut. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025</b>	-
<b>Mutasi tambah :</b>	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
	-
	-
	-
<b>Mutasi kurang :</b>	
Transfer Keluar	-
	-
	-
	-
	-
<b>Saldo per 30 Juni 2025</b>	-

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Tanah Semester I TA 2025

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	-	-	-
<b>Jumlah</b>			-

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Tanah Belum Diregister  
Rp0

**C.24 Tanah Belum Diregister**

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin  
Rp0

**C.25 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
	-
	-
	-
	-
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
	-
	-
	-
	-
<b>Saldo per 30 Juni 2025</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	-
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2025</b>	-

*Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:*

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g.
- h.
- i.
- j.
- j.
- k.

*Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:*

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

*Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.*

Peralatan dan Mesin  
Belum Diregister Rp0

### C.26 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan  
Rp0

### C.27 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Kesalahan input IP	-
	-
	-
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
<b>Saldo per 30 Juni 2025</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	-
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2025</b>	-

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- -  
- -  
- -

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- -  
- -  
- -

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan  
Belum Diregister Rp0

### C.28 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

**C.29 Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
	-
	-
	-
	-
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
	-
	-
	-
	-
	-
<b>Saldo per</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d.	-
<b>Nilai Buku per</b>	-

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- -  
- -

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- -  
- -

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

**C.30 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister**

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

**C.31 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
	-
	-
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
	-
	-
	-
	-
<b>Saldo per 30 Juni 2025</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	-
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2025</b>	-

Mutasi tambah/kurang:

*Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.*

*Aset Tetap yang Belum  
Diregister Rp0* **C.32 Aset Tetap yang Belum Diregister**

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0.

### C.33 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
Perolehan/Penambahan KDP	-
	-
	-
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
	-
	-
	-
	-
<b>Saldo per 30 Juni 2025</b>	-

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

### C.34 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Semester I Tahun 2025

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	-	-	-
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		-	-	-

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

### C.35 Aset Konsesi Jasa

Saldo Aset Konsesi Jasa per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Aset Konsesi Jasa merupakan aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa baik yang disediakan oleh mitra atau disediakan oleh pemberi konsesi. Rincian Aset Konsesi Jasa per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Konsesi Jasa Semester I TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

### C.37 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut.

*Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Semester I Tahun 2025*

No	Uraian	Jumlah
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Aset Tak Berwujud Rp0 **C.38 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai per 1 Januari 2025</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
Transfer Masuk	-
	-
	-
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
	-
	-
	-
<b>Saldo Nilai per 30 Juni 2025</b>	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2025	-
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2025</b>	-

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

a.	-
b.	-
c.	-
d.	-
e.	-

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Rp0

**C.39 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan**

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan per</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
	-
	-
	-
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
	-
	-
	-
	-
<b>Saldo per</b>	-

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Rp0

**C.40 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya**

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
Dana Lainnya	37	-
	-	-

-	-	-
-	-	-
<b>Total</b>	-	-

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

-

Dana Cadangan  
Perwakilan RI di Luar  
Negeri Rp0

#### C.41 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

##### Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Total</b>	-	-

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

-

**C.42 Aset Lain-lain**

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 1 Januari 2025</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
	-
	-
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
	-
	-
	-
	-
<b>Saldo per 30 Juni 2025</b>	-
Akumulasi Penyusutan 30 Juni 2025	-
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2025</b>	-



	-	-
	-	-
<b>Total</b>	-	-

*Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :*

#### C.46 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Total</b>	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

dgsdfgdsgjahdfihdsifthsihsf

#### C.47 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
	-
	-
	-
	-
	-
<b>Jumlah</b>	-

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :

hibah yang belum disahkan berasal dari bank

#### C.48 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-

<b>Total</b>	-	-
--------------	---	---

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

9afhasgdfgsdaifsgdhaf

Pendapatan Diterima  
Dimuka Rp0

**C.49 Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Total</b>	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

berasal dari gedung yang disewakan dengan pembayaran di awal kontrak

Uang Muka dari KPPN  
Rp560.000.000

**C.50 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp560.000.000 dan

Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	60.000.000
Tambahan Uang Persediaan	500.000.000
<b>Total</b>	<b>560.000.000</b>

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0

#### C.51 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

jfhkjhgjcgjhgjcgjhgckj

Kewajiban Konsesi Jasa Rp0

#### C.52 Kewajiban Konsesi Jasa

Saldo Kewajiban Konsesi Jasa per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kewajiban Konsesi Jasa merupakan kewajiban yang muncul karena adanya perolehan aset konsesi jasa.

Rincian Kewajiban Konsesi Jasa adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

tentang konsesii jasa

Ekuitas Rp-491.815.733

#### C.53 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp-491.815.733. dan Rp0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

#### C. 49 Catatan Penting Lainnya neraca

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan  
Rp0

### D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Pendapatan Negara  
Bukan Pajak Rp0

### D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Beban Pegawai  
Rp4.194.691.928

### D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.194.691.928 dan Rp0.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Satker Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I adalah satker Kementerian Kebudayaan yang merupakan hasil pindahan/Likuidasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sehingga belum dapat dilihat kenaikan dan penurunan karena pada tahun sebelumnya masih di Kementerian Lama. Rincian Beban Pegawai Semester I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



**D.4 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh . Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan Semester I TA 2025 dan 2024*

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan konsumsi	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**D.5 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.807.340.947 dan Rp0.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Satker Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I adalah satker Kementerian Kebudayaan yang merupakan hasil pindahan/Likuidasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sehingga belum dapat dilihat kenaikan dan penurunan karena pada tahun sebelumnya masih di Kementerian Lama. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Barang dan Jasa Semester I TA 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	1.833.839.829	-	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-	-	-
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	51.500.000	-	-
Beban Bahan	615.322.400	-	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	-	-
Beban Langganan Telepon	459.666	-	-
Beban Sewa	11.600.000	-	-
Beban Jasa Lainnya	121.559.500	-	-
Beban Jasa Profesi	24.800.000	-	-
Beban Langganan Listrik	140.188.082	-	-
Beban Langganan Air	8.071.470	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.807.340.947</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp668.965.861 dan Rp0.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Satker Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I adalah satker Kementerian Kebudayaan yang merupakan hasil pindahan/Likuidasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sehingga belum dapat dilihat kenaikan dan penurunan karena pada tahun sebelumnya masih di Kementerian Lama Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	569.723.500	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	99.242.361	-	-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>668.965.861</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp502.192.958 dan Rp0

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen disebabkan oleh Satker Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I adalah satker Kementerian Kebudayaan yang merupakan hasil pindahan/Likuidasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sehingga belum dapat dilihat kenaikan dan penurunan karena pada tahun sebelumnya masih di Kementerian Lama. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	502.192.958	-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>502.192.958,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :



#### D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester I TA 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	2025	2024	0,05
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	2025	2024	0,05
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

#### D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

*Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Semester I TA 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

#### D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

*Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Semester I TA 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

**D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.725.000 dan Rp0.

*Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester I TA 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.725.000	-	-
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Pos Luar Biasa Rp0

**D.15 Pos Luar Biasa**

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

*Rincian Pos Luar Biasa Semester I 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan PNBPN	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :



## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp0,00

### E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

Defisit LO  
Rp.8.171.466.694,00

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.8.171.466.694,00 dan Rp.0,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif  
Perubahan Kebijakan  
Akuntansi/Kesalahan  
Mendasar Rp.0.00

### E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

### E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset  
Rp.0,00

#### E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai  
Persediaan Rp0,00

#### E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
	-
	-
	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Koreksi Atas  
Reklasifikasi Rp0,00

#### E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
	-
	-
	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

#### E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2025

Jenis Aset	Nilai Koreksi
	-
	-
	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

#### E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. .

Koreksi ini

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 30 Juni 2025

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
	-
	-
	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

#### E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
	-
-	-
-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

### E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.7.679.650.961 dan Rp.0. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

#### Rincian Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	7.681.375.961
Diterima dari Entitas Lain	(1.725.000)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
<b>Jumlah</b>	<b>7.679.650.961</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

#### E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025, DKEL sebesar Rp 7.681.375.961, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 1.725.000

#### E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp0 terdiri dari :

#### Rincian Transfer Keluar Tahun 2025

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp0 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>		-

### E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2025

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

*Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :*

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Total Pengesahan</b>		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
<b>Jumlah</b>		-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2025 disajikan pada lampiran

*Ekuitas Akhir Rp-491.815.733*

### E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.-491.815.733,00 dan Rp.0,00.

### E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

**F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**

**F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA**

**F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

## **F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**

### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA**

### **F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

Satker adalah eks Satker Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan pada akhir tahun 2024 menjadi UPT satker Kementerian Kebudayaan.

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA



**KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN  
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)  
SEMESTER I TAHUN 2025**

Kode dan Nama UAKPA : (693313) BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH I  
 Kode dan Nama UAPPAP : (693313) BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH I  
 Kode dan Nama Eselon-1 : (03) DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN TRADISI  
 Kode dan Nama K/L : (140) KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
<b>KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN</b>				
<b>Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
<b>Laporan Keuangan Tambahan</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	√		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada
<b>KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI</b>				
<b>Kesesuaian Saldo</b>		<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
<b>KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI</b>				
<b>Persamaan Dasar Akuntansi</b>		<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama
<b>PENGECEKAN PADA MONSAKTI</b>				
<b>To Do List</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat	√		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada,		√	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada,		√	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan		√	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
<b>Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNPB		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
<b>Rekon Internal</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak

		Ada	Tidak	Seharusnya
	<b>Daftar MONSAKTI</b>			
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister')		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
<b>PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL</b>				
	<b>Pengecekan Saldo Neraca Percobaan</b>			
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	<b>Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	<b>Akun-Akun yang tidak boleh ada</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang		√	Tidak
	<b>Jika Bukan Satker BLU</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	<b>Terkait Satker BLU</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah		√	
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu		√	Tidak
	<b>Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	<b>Hibah Langsung</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul		√	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	√		Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	√		Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	√		Ya

	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	√		Ya
	<b>Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal</b>			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu		√	Tidak
	<b>Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada <b>Neraca Percobaan Kas?</b>		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		√	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada	√		Ya
	<b>Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun		√	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk		√	
	<b>Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
<b>PENGECEKAN NERACA</b>				
	<b>Pengecekan Pos-pos Neraca</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
<b>PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL</b>				
	<b>Pengecekan Pos-pos LO</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) ,		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat	√		Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
<b>PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b>				
	<b>Pengecekan Pos-pos LPE</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	<b>Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas	√		Ya
<b>PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)</b>				
	<b>Pengecekan Pos-pos LRA/B/P</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti		√	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah	√		Ya
<b>TELAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN</b>				
	<b>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak

	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	√		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	√		Ya
	<b>Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat &amp; Beban Bansos</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas	√		Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	√		Ya
	<b>Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		√	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)		√	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
<b>TELAH LK BLU</b>				
	<b>LPSAL BLU</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	√		Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		√	Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?	√		Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,	√		Ya
5	Apakah Nilai SILPA/SIKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	√		Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,	√		Ya
	<b>LAK BLU</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213	√		Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	√		Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	√		Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca	√		Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	√		Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	√		Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan	√		Ya
<b>LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN</b>				
"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"				
 Mengetahui Pejabat Penyusun LKBL <b>PIET RUSDI, S.Sos</b> NIP 198003042006051003		 Atas Besar, 14 Juli 2025 Penelaah, <b>RIZAL FAHMI</b> NIP 198104292014041001		

## LAPORAN OPERASIONAL

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : ( 140 ) KEMENTERIAN KEBUDAYAAN  
 ESELON I : ( 03 ) DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN TRADISI  
 WILAYAH/PROVINSI : ( 0600 ) NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
 SATUAN KERJA : ( 693313 ) BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH I

Tgl Data : 13/07/25 1:00 PM

Tgl Cetak : 13/07/25 2:47 PM

Halaman : 1

lap\_lo\_satker\_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	4,194,691,928	0	4,194,691,928	
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	2,807,340,947	0	2,807,340,947	
Beban Pemeliharaan	668,965,861	0	668,965,861	
Beban Perjalanan Dinas	502,192,958	0	502,192,958	
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

# LAPORAN OPERASIONAL

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : ( 140 ) KEMENTERIAN KEBUDAYAAN  
**ESELON I** : ( 03 ) DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN TRADISI  
**WILAYAH/PROVINSI** : ( 0600 ) NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
**SATUAN KERJA** : ( 693313 ) BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH I

Tgl Data : 13/07/25 1:00 PM

Tgl Cetak : 13/07/25 2:47 PM

Halaman : 2


lap\_lo\_satker\_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>8,173,191,694</b>	<b>0</b>	<b>8,173,191,694</b>	
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(8,173,191,694)</b>	<b>0</b>	<b>(8,173,191,694)</b>	<b>()</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,725,000	0	1,725,000	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,725,000	0	1,725,000	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>1,725,000</b>	<b>0</b>	<b>1,725,000</b>	
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(8,171,466,694)</b>	<b>0</b>	<b>(8,171,466,694)</b>	<b>()</b>
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(8,171,466,694)</b>	<b>0</b>	<b>(8,171,466,694)</b>	<b>()</b>

Keterangan :

FINAL

ACEH BESAR, 13 Juli 2025  
Penanggung Jawab UAKPA  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Official stamp of the Aceh Provincial Government, Ministry of Culture and Heritage, with a handwritten signature over it.

PIET RUSDI  
NIP. 198009042006051003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 30 JUNI 2025  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 140 ) KEMENTERIAN KEBUDAYAAN  
UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN TRADISI  
WILAYAH/PROVINSI : ( 0600 ) NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
SATUAN KERJA : ( 693313 ) BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH I

Tgl Data : 13/07/25 12:26 PM

Tgl Cetak : 13/07/25 2:47 PM

Halaman : 1

lap\_lpe\_satker\_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(8,171,466,694)	0	(8,171,466,694)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	7,679,650,961	0	7,679,650,961	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(491,815,733)	0	(491,815,733)	0
EKUITAS AKHIR	(491,815,733)	0	(491,815,733)	0

Keterangan :

FINAL

ACEH BESAR, 13 Juli 2025  
Penanggung Jawab UAKPA  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



PIET RUSDI

NIP. 198803042006051003



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEBUDAYAAN 140  
**ESELON I** : DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN TRADISI 03  
**SATUAN KERJA** : BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH I 693313

Tgl Data : 13/07/25 1:00 PM  
Tgl Cetak : 13/07/25 2:47 PM  
Halaman : 2  
lap\_lra\_face\_satker\_new\_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>	<b>37,736,045,000</b>	<b>7,681,375,961</b>	<b>(30,054,669,039)</b>	<b>20.36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Keterangan :  
FINAL

ACEH BESAR, 13 Juli 2025  
Penanggung Jawab UAKPA  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PIET RUDDY  
 NIP 198003042006051003

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 30 JUNI 2025**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 140 ) KEMENTERIAN KEBUDAYAAN**

**UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN TRADISI**

**WILAYAH/PROVINSI : ( 0600 ) NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**SATUAN KERJA : ( 693313 ) BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH I**

Tgl Data : 13/07/25 1:00 PM

Tgl Cetak : 13/07/25 2:49 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif\_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	560,000,000	0	560,000,000	0.00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>560,000,000</b>	<b>0</b>	<b>560,000,000</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>560,000,000</b>	<b>0</b>	<b>560,000,000</b>	
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	491,815,733	0	491,815,733	0.00
Uang Muka dari KPPN	560,000,000	0	560,000,000	0.00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>1,051,815,733</b>	<b>0</b>	<b>1,051,815,733</b>	
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>1,051,815,733</b>	<b>0</b>	<b>1,051,815,733</b>	
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	(491,815,733)	0	(491,815,733)	0.00
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>(491,815,733)</b>	<b>0</b>	<b>(491,815,733)</b>	<b>()</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>(491,815,733)</b>	<b>0</b>	<b>(491,815,733)</b>	<b>()</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>560,000,000</b>	<b>0</b>	<b>560,000,000</b>	

Keterangan :

FINAL

ACEH BESAR, 13 Juli 2025  
Penanggung Jawab UAKPA  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

  
PIET RUSDI  
NIP.198003042006051003

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 140 ) KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN TRADISI

WILAYAH/PROVINSI : ( 0600 ) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : ( 693313 ) BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH I

Tgl Data : 13/07/25 1:00 PM

Tgl Cetak : 13/07/25 2:50 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	60,000,000	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	500,000,000	0
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	245,795,733
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	246,020,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	560,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	7,681,375,961
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,725,000	0
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,725,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,637,838,380	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	22,968	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	116,458,150	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	33,262,116	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	16,200,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	55,210,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	17,347,845	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	80,458,620	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	131,610,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	45,015,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	137,220,865	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	3,452	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	5,552,906	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	2,221,162	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	14,956,666	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	6,867,830	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	14,948,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	14,901,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,695,285,115	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	169,311,853	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,833,839,829	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	51,500,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	615,322,400	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	140,188,082	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	459,666	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	8,071,470	0
3.0	522141	Beban Sewa	11,600,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	24,800,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	121,559,500	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	569,723,500	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 140 ) KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN TRADISI

WILAYAH/PROVINSI : ( 0600 ) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : ( 693313 ) BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH I

Tgl Data : 13/07/25 1:00 PM

Tgl Cetak : 13/07/25 2:50 PM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	99,242,361	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	502,192,958	0
<b>JUMLAH</b>			<b>8,734,916,694</b>	<b>8,734,916,694</b>

Keterangan :

FINAL

ACEH BESAR, 13 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



NIP 198002042006051003

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 140 ) KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN TRADISI

WILAYAH/PROVINSI : ( 0600 ) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : ( 693313 ) BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH I

Tgl Data : 13/07/25 12:26 PM

Tgl Cetak : 13/07/25 2:50 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	7,681,375,961
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	1,725,000	0
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,725,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,450,937,600	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20,223	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	103,793,600	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	29,661,848	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	14,400,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	48,380,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	17,272,593	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	71,333,700	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	131,610,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	40,420,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	121,202,865	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,067	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,912,186	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,964,874	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	13,206,666	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6,071,210	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	14,948,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	14,901,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,695,285,115	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	169,311,853	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,587,819,829	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	51,500,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	615,322,400	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	140,188,082	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	459,666	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	8,071,470	0
3.0	522141	Belanja Sewa	11,600,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	24,800,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	121,559,500	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	569,723,500	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	99,242,361	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	502,192,958	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	205
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	740,000

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 140 ) KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN TRADISI

WILAYAH/PROVINSI : ( 0600 ) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : ( 693313 ) BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH I

Tgl Data : 13/07/25 12:26 PM

Tgl Cetak : 13/07/25 2:50 PM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
JUMLAH			7,683,841,166	7,683,841,166

Keterangan :

FINAL

ACEH BESAR, 13 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



198003042006051003

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 140  
UNIT ORGANISASI : 03  
WILAYAH/PROVINSI : 0600  
SATUAN KERJA : 693313

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN  
NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH I

*Tgl. Cetak 13/07/2025 2:50 PM*  
*lap\_neraca\_percobaan\_sawal\_akrua\_satker\_poc*

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5

Aceh Besar, 13 Juli 2025  
Kepala



**Piet Rusdi**  
**198003042006051003**

LAPORAN REALISASI KINERJA

Tahun Anggaran 2025

Periode s.d bulan : 2025-06  
 Kementerian Negara/Lembaga : 140 - KEMENTERIAN KEBUDAYAAN  
 Eselon 1 : 140.03 - DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN TRADISI  
 Wilayah/Provinsi : 06.01 - KAB. ACEH BESAR/ACEH  
 Satuan Kerja : 693313 - BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH I

Halaman : 1  
 Tanggal Cetak : 14-07-2025

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
10	PENDIDIKAN	37,736,045,000.00	7,682,116,166.00	20.36%							
11	PENGEMBANGAN BUDAYA	37,736,045,000.00	7,682,116,166.00	20.36%							
DV	Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	19,635,119,000.00	1,121,986,000.00	5.71%							
7412	Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya	19,635,119,000.00	1,121,986,000.00	5.71%							
ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	316,932,000.00	0.00	0%							
001	Naskah Pelestarian Warisan Budaya	316,932,000.00	0.00	0%	3.0000	Rekomendasi Kebijakan	0.0000	49.98%	49.98%	( 02 ) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Dalam proses penjadwalan
PEG	Konferensi dan Event	3,254,073,000.00	0.00	0%							
001	Giat Warisan Budaya	3,254,073,000.00	0.00	0%	14.0000	Kegiatan	0.0000	49.98%	49.98%	( 01 ) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Pagu Anggaran dalam Proses pembukaan Blokir kebijakan relaksasi buka blokir
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	2,094,040,000.00	61,886,000.00	2.96%							
001	Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya	2,094,040,000.00	61,886,000.00	2.96%	56.0000	Kelompok Masyarakat	0.0000	49.98%	47.02%	( 02 ) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Proses seleksi berkas pengajuan fasilitasi
QMA	Data dan Informasi Publik	1,129,742,000.00	256,154,000.00	22.67%							
001	Data dan Informasi Warisan Budaya	1,129,742,000.00	256,154,000.00	22.67%	10.0000	Layanan	0.0000	49.98%	27.31%	( 02 ) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Dalam proses penjadwalan kegiatan bulan Juli 2025

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
RDN	OP Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	12,840,332,000.00	803,946,000.00	6.26%							
001	Cagar Budaya, ODCB dan OPK Yang Dilestarikan	12,840,332,000.00	803,946,000.00	6.26%	12.0000	Unit	0.0000	49.98%	43.72%	( 02 ) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Dalam proses penjadwalan
WA	Program Dukungan Manajemen	18,100,926,000.00	6,560,130,166.00	36.24%							
7406	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Ditjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi	18,100,926,000.00	6,560,130,166.00	36.24%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	17,800,926,000.00	6,560,130,166.00	36.85%							
956	Layanan BMN	10,000,000.00	0.00	0%	1.0000	Layanan	0.0000	49.98%	49.98%	( 02 ) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Dalam proses penjadwalan
962	Layanan Umum	1,453,880,000.00	644,171,900.00	44.31%	1.0000	Layanan	0.0000	49.98%	5.67%	( 00 )	Layanan Umum Juni 2025
994	Layanan Perkantoran	16,337,046,000.00	5,915,958,266.00	36.21%	1.0000	Layanan	0.0000	49.98%	13.77%	( 00 )	Layanan Perkantoran Bulan Juni 2025
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	300,000,000.00	0.00	0%							
951	Layanan Sarana Internal	300,000,000.00	0.00	0%	13.0000	Unit	0.0000	0%	0%	( 00 )	Pagu Anggaran dalam Proses pembukaan Blokir kebijakan relaksasi buka blokir

Aceh Besar, 13 Juli 2025  
Kepala



Piet Rusdi  
198003042006051003



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 693313  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	37,736,045,000	37,736,045,000	0
2	Belanja	7,682,116,166	7,682,116,166	0
3	Pengembalian Belanja	-740,205	-740,205	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,725,000	1,725,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	560,000,000	560,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	560,000,000	560,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 11-JUL-25*

